

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Demokrasi modern terwujud melalui demokrasi perwakilan. Dalam demokrasi perwakilan, terdapat sebuah lembaga yang menjadi pilar berdirinya demokrasi yaitu partai politik. Partai politik memiliki peran penting karena membawa kewajiban demi tujuan demokrasi.

Partai Politik di Indonesia pertama kali lahir pada zaman kolonial sebagai manifestasi kebangkitan nasional. Organisasi yang muncul pada zaman itu dilandasi oleh tujuan dan politiknya masing-masing dan memainkan peran penting dalam berkembangnya pergerakan nasional. Beberapa organisasi dan partai bergerak melalui Volkstraad yang berdiri tahun 1918. Selain itu diluar Volkstraad di bentuk GAPI (Gabungan politik Indonesia yang merupakan gabungan partai-partai beraliran nasioanal) pada tahun 1939, Sedangkan tahun 1937 dibentuk MIAI (Majelis Islamil a'lla Indonesia yang merupakan gabungan partai-partai Islam). Mereka sepakat membentuk Komite Rakyat Indonesia (Rusli Karim, 1983:218-219).

Memasuki Era Reformasi pada tahun 1998-1999, terjadi pengalihan jabatan Kepresidenan dari Soeharto ke B. J. Habibie dan rencana pelaksanaan pemilu 1999. Pada saat itu B. J. Habibie mencabut larangan pendirian partai-partai politik dan organisasi lainnya, sehingga pemilu tahun 1999 merupakan pemilu dengan system Multi partai (Arif Zulkifli, 1996:56). PDI dibentuk pada 10 Januari

1973. Pembentukan PDI sebagai hasil fusi dari lima politik (Parpol) yang berpaham atau berideologi Nasionalisme, Marhaenisme, Sosialisme, Kristen Protestan, dan Kristen Katolik. Kelima partai yang bergabung adalah Partai Nasional Indonesia (PNI), Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), Partai Murba, Partai Kristen Indonesia (Parkindo), dan Partai Katolik (Adriana Elisabet Sukamto dkk, 1991:1).

Pada awal 1999, PDI pecah menjadi dua, yaitu PDI pimpinan Budi Harjono dan PDI Perjuangan (PDI-P) pimpinan Megawati. PDI-P diresmikan melalui akte notaris 1 February 1999. Perubahan namadilakukan untuk membedakan dengan PDI lainnya (Hairun Salim dkk, 1999:95-96). Pada pemilu 1999, PDI-P ikut pemilu dan berhasil mencapai 153 kursi, namun mengalami penurunan 44 kursi pada pemilu 2004, sehingga PDI-P hanya memperoleh 109 kursi (Lukman Arif, 2004:1). Penurunan perolehan suara kursi yang dialami PDI-P tidak hanya terjadi pada tingkat nasional, tetapi terjadi di tingkat daerah pemilihan I termaksud di Kabupaten Klaten (Sugito, 2004:2).

Tabel.I

Perolehan suara/kursi PDI-P pada pemilu legislatif (DPRD Kab/Kota) dari beberapa periode di Kabupaten Klaten

No	Tahun	Perolehan suara	Jumlah kursi	Total kursi
1	2004	261,851(38,05%)	18	45
2	2009	189,200(29,00%)	15	50
3	2014	257,750(35,45%)	17	50

Sumber :www.kpu-klatenkab.go.id

Jika melihat hasil perolehan suara/kursi PDI-P pada pemilihan umum (Pemilu) legislatif (DPRD Kab/Kota) dari beberapa periode pada table diatas, dapat

disimpulkan bahwa di Kabupaten Klaten merupakan daerah basis dari PDI Perjuangan. Dalam pemilu legislatif (DPRD Kab/Kota) di Kabupaten Klaten PDI-P pada tahun 2004 memperoleh suara 261,851(38,05%) yang mengantarkan kadernya mendapat kursi terbanyak yaitu 18 kursi dari 45 kursi yang ada. Sedangkan pada tahun 2009 PDI-P memperoleh suara 189,200(29,00%) yang mendapat 15 kursi dari 50 kursi yang ada, dan pada tahun 2014 PDI-P memperoleh suara 257,750(35,45%) yang mendapat 17 kursi dari 50 kursi. Jadi dapat disimpulkan bahwa capaian perolehan kursi yang diperoleh PDI-P tahun 2004 adalah yang tertinggi, tahun 2009 terjadi penurunan perolehan kursi, namun mengalami kenaikan perolehan 2 kursi pada tahun 2014.

Tabel. II

Jumlah kader PDI-P pada pemilu legislatif DPRD (Kab/Kota) tahun 2014 di Kabupaten Klaten

No	Dapil	Jumlah Caleg	Caleg Kader	Persentase (%)
1	I	12	12	100%
2	II	10	10	100%
3	III	8	8	100%
4	IV	9	9	100%
5	V	9	9	100%
Jumlah		48	48	100%

Sumber :www.kpu-klatenkab.go.id

Dari table di atas dapat disimpulkan bahwa semua 48 calon anggota legislatif yang dicalonkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada pemilu legislatif DPRD (Kab/Kota) di kabupaten Klaten tahun 2014 adalah murni kader dari PDI-P. Dapat dikatakan kader karena 48 kader tersebut yang dicalonkan

semuanya memiliki kartu tanda anggota (KTA) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Dalam perkembangannya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Kabupaten Klaten merupakan partai penguasa karena setiap pemilu selalu memperoleh suara mayoritas. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tidak hanya memperoleh suara terbanyak pada saat pemilihan legislatif, namun juga memenangkan pemilihan kepala daerah.

Pada tahun 2010 pilihan bupati yang diselenggarakan di Kabupaten Klaten sebagai Bupati terpilih H.Sunarna, SE, M.Hum dan wakilnya Hj. Sri Hartini, SE yang diusung bersama oleh Partai PDI-P, PKS dan Partai Demokrat mampu meraih 397,106 total suara sah dan merupakan bupati dan wakil yang mempunyai latar belakang sebagai kader dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Dan di tahun 2015 pilihan bupati yang diselenggarakan dengan beberapa kandidat yang diusung oleh parpol salah satunya yaitu kader dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan mengusung pasangan bupati dan wakilnya Hj. Sri Hartini, SE dan Hj. Sri Mulyani (istri dari H. Sunarna, SE, M.Hum) mampu meraih 321,593 total suara sah yang berhasil mengulang kesuksesannya keluar sebagai Partai pemenang (www.kpu-klatenkab.go.id). Oleh karena itu tidak salah jika menyebut PDI-P menguasai struktur kekuasaan baik di tingkat legislatif maupun eksekutif.

Berdasarkan pembahasan tersebut, cukup membuktikan bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam hal Pemilukada sendiri fungsi rekrutmen

atau seleksi pemimpin yang dilakukan oleh partai ini menjadi sangat penting, Melalui partai politiklah calon pemimpin dididik, disiapkan sebagai kader partai untuk melaksanakan “platform dan ideology” partai.

Sebagai partai penguasa di Kabupetan Klaten, sumber suara yang diperoleh PDI-P salah satunya tentu disokong oleh para aktor masyarakat menengah kebawah (wong cilik). Kemenangan PDI-P dalam setiap pemilu di daerah ini diperoleh karena para petani menaruh kepercayaan pada partai berlambang kepala banteng ini. Terlebih lagi PDI-P juga mengklaim dirinya sebagai partai yang peduli terhadap sektor pertanian yang ditunjukkan pada nilai-nilai idealisme partai seperti Pancasila 1 Juni 1945, Trisakti, dan marhaenisme.

Hal inilah yang membuat penulis tertarik membahas partai politik ini, karena penulis ingin mengetahui lebih jauh tentang system perkaderan yang dilakukan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Selanjutnya, penelitian ini akan dilakukan di kantor Dewan Pengurus Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Klaten Tahun 2011-2015. Untuk itu penulis mengambil judul *“Analisis Sistem Perkaderan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan”*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah sebagaimana dikemukakan diatas dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut :

Bagaimana sistem perkaderan yang dilakukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Dewan Pengurus Cabang Kabupaten Klaten Tahun 2011-2015 ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian :

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan secara objektif proses kaderisasi yang dilakukan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

2. Manfaat Penelitian

1) Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat :

Menambah literatur serta pengetahuan tentang teori system perkaderan dalam menginformasikan serta mempersuasif masyarakat tentang proses kaderisasi yang dilakukan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

2) Secara praktis, hasil penelitian ini dapat :

a. Bagi peneliti

Menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman peneliti tentang system perkaderan serta dapat mengaplikasikan teori – teori yang diperoleh selama masa kuliah ke dalam dunia kerja.

b. Bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Penelitian ini dapat bermanfaat terutama digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan bahan pembelajaran untuk melaksanakan kaderisasi ke depan.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, penelitian ini di maksudkan untuk mengetahui system perkaderan DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Klaten.

D. Kerangka Dasar Teori

1. Partai Politik

a. Pengertian Partai Politik

Dalam penyelenggaraan pemilihan umum partai politik merupakan salah satu unsur yang wajib ada dalam system tersebut. Dipergunakan untuk mempermudah penyaluran partisipasi masyarakat dalam hak politiknya. Adapun beberapa ilmuwan mendefinisikan partai politik sebagai berikut:

1. Carl J. Friedrich

Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil serta materiil.

2. Sigmund Neumann

Partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda.

3. Giovanni Sartori

Partai politik adalah suatu kelompok yang mengikuti pemilihan umum dan, melalui pemilihan umum itu, mampu

menempatkan calon-calonnya untuk menduduki jabatan-jabatan publik.

4. Miriam Budiarmo

Partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orienasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama, tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya (Miriam Budiarmo, 2008 : 404).

Jadi yang dimaksud dengan partai politik dalam penelitian ini adalah suatu kelompok yang beranggotakan berbagai golongan yang mempunyai pandangan ide, serta cita-cita yang sama dan harus diperjuangkan serta mempunyai tujuan untuk memperoleh kekuasaan.

b. Fungsi Partai Politik

Menurut Ramlan Surbakti (1992:116-121), Fungsi utama partai politik ialah mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu. Berikut ini sejumlah fungsi partai politik:

1. Sosialisasi Politik

Sosialisasi politik ialah proses pembentukan sikap dan orientasi politik para anggota masyarakat. Melalui proses sosialisasi politik inilah para anggota masyarakat memperoleh sikap dan

orientasi terhadap kehidupan politik yang berlangsung dalam masyarakat.

2. Rekrutmen Politik

Rekrutmen Politik ialah seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam system politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya.

3. Partisipasi Politik

Partisipasi politik ialah kegiatan yang warga Negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan umum dan dalam ikut menentukan pemimpin pemerintahan.

4. Komunikasi Politik

Komunikasi Politik ialah proses penyampaian informasi mengenai politik dari pemerintah kepada masyarakat dan dari masyarakat kepada pemerintah.

5. Pengendali Konflik

Mengendalikan konflik yang timbul dalam sistem politik melalui lembaga demokratik untuk mendapatkan penyelesaian dalam bentuk keputusan politik.

6. Kontrol Politik

Kontrol politik ialah kegiatan untuk menunjukkan kesalahan, kelemahan dan penyimpangan dalam isi suatu kebijakan atau

dalam pelaksanaan kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah.

Jadi yang dimaksud dengan fungsi partai politik dalam penelitian ini adalah mencoba mengetahui cara dari sebuah Partai Politik khususnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan bekerja dalam masyarakat sesuai dengan ideologi yang menjadi dasarnya.

c. Tugas Partai Politik

Menurut Sulistiati Ismail Gani (1987:113-114), Dalam Negara yang berpaham demokrasi, di mana masyarakatnya merupakan masyarakat heterogen, partai politik mempunyai beberapa tugas, di antaranya yaitu :

1. Tugas pokok partai politik yaitu menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah. Partai politik disini bertugas untuk menampung semua pendapat dan keinginan rakyat atau khalayak, kemudian langkah selanjutnya memilih dan merumuskan serta menyerahkan kepada pemerintah untuk dapat dijadikan politik yang akan diperjuangkan semaksimal mungkin.
2. Partai politik juga mempunyai tugas untuk menyebarluaskan gagasan atau ide-ide tersimpul didalam rencana kebijakan pemerintah.

3. partai politik mempunyai tugas mendidik para warga Negara menjadi orang yang sadar akan tanggung jawabnya sebagai mahluk sosial.
4. Partai politik mempunyai tugas untuk menumbuhkan dan memupuk kesadaran akan loyalitas nasional.
5. partai politik bertugas untuk mengatur pertikaian dan membantu merumuskan konflik-konflik dan selanjutnya berusaha mengatasi konflik tersebut serta mencari penyelesaiannya.

Jadi yang dimaksud dengan tugas partai politik dalam penelitian ini adalah peran serta tanggung jawab dari partai politik untuk membantumenyampaikan aspirasi dari masyarakat, mengajarkan politik dan ikut membantu pemerintah merumuskan pembuatan kebijakan.

2. Rekrutmen Politik

Sebagai sarana rekrutmen politik (instrument of political recruiment), yakni proses melalui mana partai mencari anggota baru dan mengajak orang yang berbakat untuk berpartisipasi dalam proses politik. Rekrutmen politik akan menjamin kontinuitas dan kelestarian partai, dan sekaligus merupakan salah satu cara untuk menyeleksi para calon pimpinan partai atau pimpinan bangsa (Mukthie Fajar, 2008:23). Yang kemudian dapat kita lihat dan rasakan dampaknya ketika para kader partai tersebut menduduki jabatan di eksekutif maupun legislatif.

a. Bentuk dan Jenjang Perkaderan

Perkaderan didefinisikan oleh Ivancevich (1995) adalah sebagai “usaha meningkatkan kinerja kader dalam pekerjaannya sekarang atau dalam pekerjaan lain yang akan dijabatnya segera”. Beliau mengemukakan sejumlah butir penting tentang perkaderan yang dapat kita lihat dibawah ini:

1. Perkaderan (Training)

Adalah sebuah proses sistematis untuk meningkatkan kinerja aparat organisasi. Perkaderan terkait dengan keterampilan dan kemampuan yang diperlukan untuk pekerjaan yang sekarang dilakukan. Perkaderan berorientasi ke masa sekarang dan membantu kader untuk menguasai keterampilan dan kemampuan (kompetisi) yang spesifik untuk berhasil dalam pekerjaannya.

2. Belajar (Learning)

Adalah tindakan yang dilakukan oleh pihak kader dalam usaha menguasai ketrampilan, pengetahuan, dan sikap tertentu yang mengakibatkan perubahan yang relatif permanen dalam perilaku kinerja mereka.

3. Ketrampilan (Skill)

Adalah setiap perilaku kerja yang telah dipelajari. Oleh karena itu, yang harus dicapai dalam perkaderan adalah peningkatan keterampilan yang diperlukan keterampilan yang biasanya menjadi

prioritas utama perkaderan adalah ketrampilan yang bersifat motorik (menggunakan organ tubuh terutama tangan), kognitif (kemampuan yang menggunakan daya nalar atau analisis), dan verbal (menggunakan mulut atau berkomunikasi) yang juga disebut ketrampilan “interpersonal” (Achmad S Ruky, 2006:230-231).

Jadi dapat ditarik kesimpulannya bahwa dalam sebuah partai politik pengkaderan merupakan kewajiban yang harus dilakukan untuk meningkatkan SDM Dalam hal kemampuan, pengetahuan serta sikap dan daya kinerja yang lebih baik.

b. Prinsip Dasar bagi Pengkaderan

Menurut Czudnowski (Dalam buku Koirudin, 2004:113-114), Kaderisasi di organisasi manapun merupakan urat nadi bagi sebuah organisasi. Kaderisasi adalah proses penyiapan SDM agar kelak mereka menjadi para pemimpin yang mampu membangun peran dan fungsi organisasi secara lebih bagus. Dalam pengkaderan, ada dua persoalan yang penting :

Pertama, bagaimana usaha-usaha yang dilakukan oleh organisasi untuk peningkatan kemampuan baik keterampilan maupun pengetahuan.

Kedua, adalah kemampuan untuk menyediakan stok kader atau SDM organisasi, dan terutama dikhususkan pada kaum muda.

Kemudian Czudnowski (Dalam buku Koirudin, 2004:101-102) mengemukakan terkait rekrutmen politik. Ia mengemukakan beberapa hal yang dapat menentukan terpilih atau tidaknya seseorang dalam lembaga legislatif :

1. ***Social Background***, artinya faktor ini berhubungan dengan pengaruh status sosial dan ekonomi keluarga dimana seorang calon elit dibesarkan.
2. ***Political Socialization***, dimana melalui sosialisasi politik seseorang menjadi terbiasa dengan tugas-tugas ataupun isu-isu yang harus dilaksanakan oleh satu kedudukan politik. Dengan demikian, orang tersebut dapat menentukan apakah dia mau dan punya kemampuan untuk menduduki jabatan tersebut sehingga dia dapat mempersiapkannya dengan baik.
3. ***Initial Political Activity***, dimana faktor ini menunjuk kepada aktivitas atau pengalaman politik seorang calon elit selama ini.
4. ***Apprenticeship***, dimana faktor ini menunjuk langsung kepada proses “magang” dari calon elit ke elit lain yang sedang menduduki jabatan yang diincar oleh calon elit.
5. ***Occupational variables***, dimana disini calon elit dilihat pengalaman kerjanya dalam lembaga formal yang belum tentu berhubungan dengan politik. Ini menarik sebab elit politik sebenarnya tidak sekedar dinilai dari popularitas saja (sesuai dengan ajaran demokrasi), namun dinilai pula faktor kapasitas

intelektual, percaya diri, vitalitas kerja, latihan peningkatan kemampuan yang diterima, dan pengalaman kerja.

6. **Motivations**, dimana hal ini merupakan faktor yang paling penting, yakni melihat motivasi yang dimiliki oleh calon elit tersebut menduduki suatu jabatan tertentu.

Jadi dapat disimpulkan bahwa bentuk pendidikan politik sangat perlu dilakukan karena pada setiap partai politik pasti berbeda-beda. Kemampuan sebuah partai untuk melakukan pengemblengan atau pematangan terhadap SDM-nya sangatlah dipengaruhi oleh kemampuan para pengurusnya untuk memfasilitasi pengadaan pendidikan dan pelatihan secara intensif dibidang-bidang tertentu terhadap kader-kadernya. Hal ini dilakukan sejauh menyangkut peningkatan kemampuan secara simultan dan terencana pada semua tingkatan kepengurusan partai.

c. Metode Perkaderan

Menurut Prof. Koentjoroningrat (1983:68), metode (methodis) adalah suatu cara atau jalan sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut cara kerja yaitu memahami objek yang menjadi sasaran. Jadi metode perkaderan adalah suatu metode yang digunakan dalam pelaksanaan perkaderan.

Menurut Drs. Moekijat (1992:79), bahwa metode perkaderan itu banyak sekali jumlahnya dan tidak satupun metode yang paling baik

bila dibandingkan dengan metode yang lain. Oleh karena itu metode-
metode yang digunakan dalam suatu perkaderan disesuaikan dengan
jenis perkaderan yang akan diberikan kepada perorangan atau
kelompok. Menurut Drs. Manullang (Dalam buku Achmad S Ruky,
2006:248-249) metode perkaderan dapat dibagi menjadi tiga model
yakni :

1. Metode Kuliah

Metode kuliah adalah proses penyampaian informasi dan
pengetian dari perkaderan kepada peserta perkaderan dalam waktu
yang relative singkat. Metode ini dapat sangat efektif, kurang
efektif maupun dapat juga membosankan peserta. Hal ini
tergantung dari sumber daya manusia yang menjadi tainer.

2. Case Method dan Incident Method

Case Method adalah suatu metode dimana para peserta
diberikan suatu kasus untuk dipecahkan dan dianalisis. Kasus yang
digunakan untuk merangsang topik-topik diskusi dan dari semua
jenis seperti simulasi, kasus sederhana, ataupun kompleks.

Incident Method adalah suatu metode dimana para peserta
diberikan suatu kasus dalam bentuk laporan tertulis yang pendek,
kemudian keterangan selanjutnya dicari oleh peserta sendiri dengan
mengajukan pertanyaan kepada pelatih atau seseorang yang telah
ditentukan untuk memberikan informasi. Kemudian peserta

diminta untuk memecahkan masalah tersebut dan mengambil keputusan.

Perbedaan antara Case Method dan Incident Method adalah dalam Case Method peserta diberikan gambaran masalah 80%, sedangkan pada Incident Method peserta hanya diberikan gambaran masalah 25% saja. Selebihnya dicari sendiri oleh peserta. Sedangkan kelemahan keduanya adalah :

- 1) Pemakaian kasus lama kurang baik, karena keadaan terjadinya kasus tersebut telah berbeda pada saat kasus tersebut diberikan dalam pelatihan.
- 2) Tidak segera dapat mengetahui efektivitas dari metode tersebut.

3. Simulation Method

Simulation method adalah metode dimana para peserta pelatihan lebih memainkan peranan dalam suatu organisasi. Sebagian peserta menjadi pengamat dari peran yang dimainkan oleh peserta yang lain. Adapun jenis simulasi terdiri dari tiga model yakni :

a. Management Game

Yaitu peserta diminta peran sebagai manajer dari suatu organisasi tiruan dan kemudian berdasarkan data yang telah disiapkan, kemudian peserta diminta mengambil keputusan. Dapat juga peserta dibagi dalam beberapa grup, kemudian

disediakan keterangan-keterangan, dan grup-grup tersebut harus mengambil keputusan sebelum permainan selesai, lalu diadakan presentasi dari masing-masing grup.

b. In Basket Exercis atau in Tray Exercis

Yaitu para peserta dilatih ketrampilannya dalam memisahkan mana yang penting dan mana yang tidak ketika dihadapkan didalam suatu masalah. Kemudian peserta dapat mengambil keputusan yang cepat dan tepat dalam waktu yang relatif singkat.

c. Role Playing

Suatu model simulasi yang digunakan dalam human relation training gunanya adalah untuk pengembangan keahlian human relation.

d. Evaluasi pertrainingan

Evaluasi pertrainingan merupakan tahapan didalam suatu perkaderan yang memfokuskan pada pemantauan hasil-hasil dari suatu perkaderan yang telah dilaksanakan sebelumnya. Adapun beberapa tahapan didalam melakukan evaluasi terhadap pertrainingan adalah sebagai berikut :

1) Keefektifan Pelaksanaan Pertrainingan

Evaluasi jenis ini adalah evaluasi yang termasuk kategori tahap pertama dan hanya untuk mengukur bagaimana reaksi peserta terhadap perkaderan,

kemampuan instruktur, kepanitiaan, dan penilaian peserta keseluruhan. Cara yang biasa digunakan adalah meminta para peserta untuk mengisi kuisioner yang berisi beberapa pertanyaan tentang reaksi dan kesan mereka atas penyelenggaraan perkaderan tersebut. Pertanyaan biasanya berkisar pada topik-topik yang telah dibahas apakah relevan atau tidak, bagaimana kemampuan pengajar dalam melakukan tugasnya, dan aspek aspek kepanitiaan.

2) Penyerapan/Retensi Materi

Kegunaan evaluasi pada tahapan ini adalah untuk mengukur sampai sejauh mana pemahaman peserta terhadap materi yang telah diberikan. Pengukuran biasanya dilaksanakan dalam bentuk tes pasca perkaderan yang dilakukan menjelang hari-hari terakhir dari perkaderan.

3) Dampak Perkaderan pada Perilaku Kerja

Manfaat dilakukannya evaluasi pada tahap ini adalah untuk mengukur tingkat perubahan perilaku kerja yang terjadi setelah mereka mengikuti perkaderan. Apakah perilaku kerja telah berubah seperti yang diharapkan dan seberapa besar derajat perubahan tersebut. Evaluasi pada tahap ini harus dilakukan oleh atasan langsung

dari kader yang telah mengikuti perkaderan dengan mencatat perubahan-perubahan tersebut. Evaluasi juga bisa dilaksanakan dengan meminta dari pelanggan yang dilayani oleh karyawan tersebut atau oleh “pelanggan internal”, yaitu karyawan atau pejabat lain dalam perusahaan yang juga dilayani oleh karyawan tersebut.

Jadi dapat ditarik kesimpulannya bahwa Dalam perkaderan pada tahap pembelajaran menggunakan metode kuliah akan dapat diketahui kader untuk berproses dengan waktu yang begitu singkat untuk menerima materi yang diberi oleh pemateri pada proses pengkaderan. Dalam hal ini dapat dikatakan kader diberikan pendidikan secara umum untuk menerima pengetahuan yang belum diketahuinya.

Sedangkan dalam perkaderan menggunakan case method dan incident method menggambarkan bagi seorang kader untuk dapat memecahkan masalah dalam porsi yang berbeda dan mencari solusi ketika diberikan persoalan oleh pemateri dalam perkaderan. Dalam hal ini kader dilatih untuk dapat bertanggung jawab ketika nanti menghadapi problem pada situasi yang sebenarnya.

Terakhir pengkaderan dalam bentuk simulation method yakni dapat dijelaskan bahwa kader akan diberikan kesempatan untuk

berpraktek secara langsung. Dalam hal ini kader akan berperan meningkatkan kemampuannya, keterampilannya dan keahliannya.

E. Definisi Konsepsional

Defenisi konsepsional adalah suatu usaha untuk menjelaskan tentang pembatasan pengertian antara konsep yang satu dengan yang lainnya agar tidak terjadi kesalahpahaman didalam melakukan penerapan teori pada skripsi ini.

Adapun defenisi konsepsional yang digunakan didalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Partai politik adalah sebuah wadah perkumpulan masyarakat atau warga Negara yang mempunyai ide, tujuan, cita-cita yang sama dan berkeinginan untuk mencapai dan mempertahankan kekuasannya serta memperjuangkan kepentingan kelompoknya.
2. Rekrutmen Politik yaitu proses mencari anggota atau kader untuk di seleksi, agar dapat terpilih kader yang berkualitas.
3. Kaderisasi adalah cara yang dilakukan sebuah partai untuk mendidik anggotannya (SDM).
4. Sistem Perkaderan adalah aturan-aturan yang selalu diterapkan secara teratur pada saat perkaderan.

F. Definisi Operasional

Defenisi Operasional adalah rician indikator yang berguna sebagai panduan dalam mengumpulkan data dilapangan. Dalam penelitian tentang

sistem pengkaderan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, indikatornya adalah :

1. Sistem Pengkaderan yang Meliputi :
 - a. Bentuk Perkaderan
 - b. Tujuan Perkaderan
2. Metode Perkaderan Meliputi :
 - a. Metode kelas
 - b. Metode lapangan
3. Evaluasi Perkaderan Meliputi :
 - a. Perkembangan jumlah kader
 - b. Perkembangan kualitas kader

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Deskriptif, adapun penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti dimana pemecahan masalah yang diselidiki dengan cara menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek/objek pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana mestinya.

2. Jenis Data

a. Data Primer

Data Primer adalah data dan informasi yang diperoleh melalui keterangan dari pihak-pihak yang berkompeten dan berpengaruh terhadap masalah yang ada data penelitian ini serta pihak-pihak

terkait didalam penelitian ini. Adapun pihak-pihak yang berkompeten ini adalah pihak atau individu yang mempunyai tingkat pengaruh yang tinggi didalam DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Klaten.

Tabel. III
Data Primer

Nama Data	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data
Perencanaan sistem Perkaderan pada PDI Perjuangan	DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Klaten	Wawancara
Pelaksanaan metode Perkaderan pada PDI Perjuangan	DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Klaten	Wawancara
Hasil pelaksanaan evaluasi perkaderan pada PDI Perjuangan	DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Klaten	Wawancara

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai catatan, buku-buku, artikel-artikel ilmiah, koran, dan dokumen pendukung lainnya yang berhubungan dengan tema penelitian ini.

Tabel. IV
Data Sekunder

Data Sekunder	Sumber Data	Keterangan
Hasil Musrembang Partai	DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Klaten	Dokumen
Kegiatan-kegiatan Perkaderan Partai	DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Klaten	Dokumen
Data perkembangan jumlah kader	DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Klaten	Dokumen

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Dokumen yang digunakan bersumber pada arsip-arsip resmi yang berhubungan dengan pengkaderan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu sendiri. Dalam menguji keabsahan data, dapat digunakan tehnik triangulasi, yaitu tehnik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data yang ada untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Atau lebih jelasnya tehnik triangulasi yang paling banyak digunakan dalam pemeriksaan melalui sumber lain. Pemeriksaan keabsahan data ini dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, dengan dokumen yang berkaitan.

b. Wawancara

Tehnik wawancara (interview) adalah cara pengumpulan data melalui kontak langsung antar pengumpul data dengan sumber data yang dikenal dengan sebutan reponden (Jalaludin Rahmat, 1989:110). Merupakan metode untuk memperoleh data dengan caramewawancarai secara langsung para responden yang mempunyai kewenangan sehubungan dengan pengkaderan didalam Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Pada proses ini penulis akan melakukan wawancara secara langsung dengan responden sebagai berikut :

- 1) Bapak Agus Arianto selaku Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Klaten
- 2) Bapak Sutarjo selaku Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Klaten
- 3) Bapak Andi Purnomo, SH selaku Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Klaten
- 4) Ibu Hj. Kadarwati, SH, MH selaku Wakil Ketua Bidang Organisasi, Keanggotaan, Kaderisasi dan Rekrutmen DPC PDI Perjuangan Kabupaten Klaten
- 5) Kader/anggota DPC PDI Perjuangan Kabupaten Klaten (beberapa orang).

4. Teknik Analisa Data

Dalam menganalisis data tehnik yang digunakan adalah tehnik kualitatif, yaitu menganalisa masalah tanpa menggunakan data statistik data matematis, dengan menggunakan analisa ini agar mendapat jawaban yang ilmiah, logis, dan empiris. Dalam penelitian ini penulis akan berusaha menginterpretasikan fenomena-fenomena yang ada, yang muncul dan yang terjadi dari data-data terkumpul tanpa penghitungan statistik (Noeng Muhadjir, 1989:71).